



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 41/PHP.KOT-XIV/2016**

TENTANG

**PERSELISIHAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2015**

- Pemohon** : Drs. H. Muhammad Hasan Bay, M.M. dan H. Mochtar Sangaji, S.IP.
(Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, Tahun 2015, Nomor Urut 2).
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara.
- Pihak Terkait** : Capt. H. Ali Ibrahim, M.H. dan Muhammad Senin, S.E.
(Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, Tahun 2015, Nomor Urut 3).
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015.
- Amar Putusan** : Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : 18 Januari 2016.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon Drs. H. Muhammad Hasan Bay, M.M. dan H. Mochtar Sangaji, S.IP adalah Pasangan calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan tahun 2015 dengan nomor urut 2 berdasarkan Keputusan KPU Kota Tidore Kepulauan Nomor 47/Kts/KPU-TK-030.436364/2015, tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan, tertanggal 24 Agustus 2015.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015 yang diumumkan oleh KPU Kota Tidore Kepulauan pada tanggal 16 Desember 2015, pukul 16.08 WIT, berdasarkan Keputusan KPU Kota Tidore Kepulauan Nomor 71/Kpts/KPU-TK-030.436364/TAHUN2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015.

Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*", dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*"

Sehubungan dengan adanya eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan pengajuan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu, Mahkamah mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu.

Berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 tenggang waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3x24 jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 71/Kpts/KPU-TK-030.436364/TAHUN2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015 pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015, pukul 16.08 WIT. Sementara permohonan Pemohon baru diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu, 26 Desember 2015, pukul 14.06 WIB atau 16.06 WIT. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan telah melewati tenggang waktu beralasan menurut peraturan perundang-undangan.

Oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum, maka kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, pokok permohonan, serta eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait lainnya tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait sepanjang mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.